

Receive : 04 June 2026

Revised : 15 June 2026

Accepted : 17 June 2026

Jurnal ADMINISTRATOR

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v8i1.124

Vol. 8 No. 1 June 2026, Hlm. 122-128



PERAN PEMERINTAHAN DALAM MENDORONG MODERASI BERAGAMA: STUDI KASUS HUMAS KEMENTERIAN AGAMA DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Fajri Adi Nugraha¹, Sundawa Bachtiar²

E-Mail : lppmstisip27@gmail.com

STISIP Tasikmalaya^{1,2}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Agama dalam mendorong moderasi beragama di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam konteks masyarakat multikultural, moderasi beragama menjadi penting untuk menjaga harmoni sosial serta mencegah munculnya intoleransi dan radikalisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus analisis meliputi peran Humas dalam menyosialisasikan kebijakan, membangun strategi komunikasi persuasif, serta mengelola opini publik terkait isu keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas berperan strategis dalam membangun narasi moderasi beragama yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal. Komunikasi yang efektif meningkatkan pemahaman masyarakat dan memperkuat kerukunan, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya dan dinamika sosial-keagamaan.

Kata Kunci : peran pemerintah, moderasi beragama, Kementerian Agama.

Receive : 04 June 2026
Revised : 15 June 2026
Accepted : 17 June 2026

Jurnal ADMINISTRATOR

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v8i1.124

Vol. 8 No. 1 June 2026, Hlm. 122-128



ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Ministry of Religious Affairs' Public Relations in promoting religious moderation in Tasikmalaya Regency. In the context of a multicultural society, religious moderation is essential for maintaining social harmony and preventing the rise of intolerance and radicalism. This study employs a qualitative descriptive approach, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The analytical focus encompasses the role of Public Relations in disseminating policies, building persuasive communication strategies, and managing public opinion regarding religious issues. The results show that Public Relations plays a strategic role in developing contextual and local wisdom-based narratives of religious moderation. Effective communication enhances public understanding and strengthens harmony, although challenges such as limited resources and socio-religious dynamics still persist.

Keywords: *government role, religious moderation, Ministry of Religious Affairs.*

LATAR BELAKANG

Dalam konteks pemerintahan modern, komunikasi publik memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun pemahaman, meningkatkan partisipasi, serta membentuk opini publik yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.

Salah satu isu strategis dalam kebijakan publik di Indonesia saat ini adalah penguatan moderasi beragama. Moderasi beragama menjadi penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Agama memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa nilai-nilai moderasi beragama dapat dipahami, diterima, dan diimplementasikan secara luas oleh masyarakat.

Peran tersebut tidak dapat dilepaskan dari fungsi Hubungan Masyarakat (Humas) sebagai ujung tombak komunikasi pemerintahan. Humas pemerintah tidak lagi sekadar menjalankan fungsi teknis penyebaran informasi, tetapi telah berkembang menjadi fungsi manajerial yang berperan dalam membangun citra institusi, mengelola opini publik, serta

menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat secara dialogis dan berkelanjutan.

Dalam konteks moderasi beragama, Humas Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam menyosialisasikan kebijakan, membingkai narasi keagamaan yang inklusif, serta mengelola isu-isu keagamaan yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Hal ini menjadi semakin penting, terutama di daerah dengan karakteristik masyarakat yang religius dan memiliki keragaman pemahaman keagamaan seperti Kabupaten Tasikmalaya.

Di sisi lain, Humas Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan perannya. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, kompleksitas isu keagamaan, serta dinamika opini publik yang berkembang pesat, terutama melalui media sosial. Kondisi ini menuntut Humas untuk mampu menyusun strategi komunikasi yang adaptif, persuasif, dan kontekstual sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal.

Selain itu, realitas sosial masyarakat Tasikmalaya yang dikenal religius dan memiliki tradisi keagamaan yang kuat menjadikan proses internalisasi nilai moderasi beragama tidak selalu berjalan secara linear. Diperlukan pendekatan komunikasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga

partisipatif dan berbasis kearifan lokal agar pesan yang disampaikan dapat diterima tanpa menimbulkan resistensi.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai peran pemerintahan melalui fungsi Humas Kementerian Agama dalam mendorong moderasi beragama menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, strategi komunikasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Humas dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama di masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya pada bidang komunikasi pemerintahan dan kebijakan publik, serta memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan peran Humas Kementerian Agama dalam memperkuat moderasi beragama di tingkat daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena sosial terkait peran pemerintahan melalui fungsi Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya dalam mendorong moderasi beragama. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan kontekstual mengenai

peran, strategi komunikasi, serta praktik kehumasan dalam implementasi kebijakan moderasi beragama.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Humas, tokoh agama, serta masyarakat terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati pola komunikasi, interaksi dengan masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan kehumasan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa arsip, laporan kegiatan, serta kebijakan terkait moderasi beragama guna memperkuat hasil penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan metode ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran Humas dalam mendorong moderasi beragama di tingkat daerah.

PEMBAHASAN

1. Peran Humas dalam Mendorong

Moderasi Beragama Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Kementerian Agama Kabupaten

Tasikmalaya memiliki peran strategis dalam mendorong moderasi beragama melalui fungsi komunikasi publik. Peran tersebut meliputi penyebaran informasi kebijakan, edukasi masyarakat, serta mediasi dalam menangani isu-isu keagamaan. Humas berfungsi sebagai komunikator utama yang menyampaikan pesan moderasi beragama secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, Humas juga berperan sebagai fasilitator dialog antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, Humas berupaya menciptakan komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan pemahaman yang lebih baik, terutama dalam menghadapi perbedaan pandangan keagamaan di masyarakat.

2. Strategi Komunikasi Humas.

Strategi komunikasi yang diterapkan oleh Humas meliputi pendekatan persuasif, edukatif, dan partisipatif. Pendekatan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, penyuluhan, dialog keagamaan, serta pemanfaatan media sosial. Berikut adalah ringkasan strategi komunikasi yang digunakan: No Strategi Komunikasi Bentuk Kegiatan Tujuan 1 Persuasif Penyalpaaian pesan moderasi secara halus Meningkatkan penerimaan masyarakat 2 Edukatif Sosialisasi dan penyuluhan Menambah pemahaman tentang moderasi 3 Partisipatif Dialog dengan tokoh agama dan masyarakat

Membangun keterlibatan publik 4 Digital Media sosial dan publikasi online Memperluas jangkauan informasi Pemanfaatan media digital menjadi salah satu strategi penting dalam menjangkau masyarakat luas secara cepat dan efisien. Namun, penggunaan media ini juga memerlukan kemampuan pengelolaan informasi yang baik untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak valid.

3. Efektivitas Peran Humas

Efektivitas peran Humas dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya moderasi beragama. Program komunikasi yang dilakukan mampu mendorong sikap toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Berikut indikator efektivitas yang ditemukan: No Indikator Temuan 1 Pemahaman masyarakat Meningkat terhadap moderasi beragama 2 Partisipasi masyarakat Cukup aktif dalam kegiatan dialog 3 Kerukunan sosial Relatif terjaga 4 Penyebaran informasi Semakin luas melalui media digital Meskipun demikian, efektivitas tersebut belum optimal karena masih terdapat hambatan dalam implementasinya.

4. Kendala yang Dihadapi

Beberapa kendala utama yang dihadapi Humas dalam mendorong moderasi beragama antara lain: No Kendala Dampak 1 Keterbatasan SDM Kekurangan tenaga professional komunikasi 2 Sarana terbatas Kegiatan

komunikasi tidak maksimal 3 Kompleksitas sosial Sulit menyatukan persepsi Masyarakat 4 Media Digital Munculnya informasi hoaks Kendala tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan strategi komunikasi yang lebih adaptif.

Pembahasan penelitian ini menguatkan teori komunikasi pemerintahan yang menyatakan bahwa Humas memiliki peran strategis dalam membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks moderasi beragama, Humas tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengelola opini publik dan agen perubahan sosial.

Pendekatan komunikasi yang berbasis kearifan lokal terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap moderasi beragama. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh cara penyampaian yang sesuai dengan budaya masyarakat. Namun demikian, untuk meningkatkan efektivitas peran Humas, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur komunikasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak seperti tokoh agama dan organisasi masyarakat menjadi faktor penting

dalam memperluas dampak kebijakan moderasi beragama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Humas Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong moderasi beragama di masyarakat. Peran tersebut tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai edukator, fasilitator, dan mediator dalam menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat terkait isu-isu keagamaan. Melalui fungsi komunikasi publik, Humas mampu membangun narasi moderasi beragama yang inklusif, toleran, dan kontekstual sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal.

Strategi komunikasi yang diterapkan meliputi pendekatan persuasif, edukatif, dan partisipatif, serta didukung oleh pemanfaatan media digital. Pendekatan berbasis kearifan lokal terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai moderasi beragama. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh metode dan konteks penyampaian pesan tersebut.

Meskipun demikian, efektivitas peran Humas masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan

sumber daya manusia, sarana dan prasarana komunikasi, serta kompleksitas dinamika sosial dan keagamaan di masyarakat. Selain itu, perkembangan media digital yang pesat juga menjadi tantangan dalam mengelola informasi dan opini publik yang tidak selalu sejalan dengan kebijakan moderasi beragama.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan Humas melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan strategi komunikasi yang inovatif dan adaptif, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, kolaborasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi moderasi beragama di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peran Humas sangat penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan moderasi beragama sebagai upaya menjaga kerukunan dan stabilitas sosial di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS (2010). Sensus Penduduk 2010. [cite_start]Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS & ISEAS. (2013). Klarifikasi Kelompok Suku Besar.

- Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran.
- Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2013..
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2011). The New Public Service: Serving, Not Steering..
- Dye, T. R. (2013). Understanding Public Policy.
- Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). Managing Public Relations
- Kementerian Agama RI. (2019). Implementasi Moderasi Beragama. Jakarta: Kemenag RI
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyadi. (2014). Komunikasi Pemerintah.
- Ndraha, T. (2011). Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru
- Patria, N., & Nugroho, R (2013). Komunikasi Kebijakan.
- Rasyid, M. R. (2007). Kajian Ilmu Pemerintahan.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Zuhri, L. S. (2022). Moderasi Beragama: Tanggapan Atas Masalah Kesalahpahaman, Tuduhan, dan Tantangan